



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Sabtu, 16 September 2017

Proyek Reklamasi Pantai Namlea Naik Penyidikan

Ambon - Penanganan kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pantai atau disebut Water Front City di Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015 naik ke tahap penyidikan.

Naiknya status hukum proyek APBN senilai Rp 4.911.700.000 milik Dinas PU Kabupaten Buru ini berdasarkan hasil ekspos tim penyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane, Kamis (14/9).

Dalam ekspos itu, tim penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan berbagai temuan yang diperoleh beserta bukti dan dokumen pendukung.

Kesimpulannya, proyek yang dikerjakan CV Aegeo Media Pratama milik Sahran Umasugi itu, sarat masalah. Pekerjaan tak sesuai kontrak. Bahkan ada yang diduga fiktif.

Menyusul naik statusnya penanganan kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pantai, Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: 08/S.1/Fd.1/09/2017 tanggal 15 September 2017.

Informasi yang diperoleh dari Kejati Maluku menyebutkan, pekerjaan yang tidak sesuai bestek diantaranya, pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai merah putih. Namun ternyata tiang pancang tidak dikerjakan. Ironisnya, dilaporkan pekerjaan rampung 100 persen.

“Pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tetapi tidak dikerjakan. Item ini diganti dengan penimbunan batu dari buangan sisa proyek bandara Namniwel di Desa Sawa,” kata sumber itu.

Padahal untuk pemancangan 300 tiang, berdiameter 60 centimeter dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar.

Sumber itu juga menyebutkan, proses lelang yang dilakukan hanya formalitas saja. Karena sudah diatur untuk CV Aegeo Media Pratama sebagai pemenang. “Diduga hanya formalitas, karena sudah ada pemenangnya alias titipan,” ujarnya.

Kasi Penkum dan Humas kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi membenarkan, penanganan kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pantai di Namlea sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Benar untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas PU Buru dalam kegiatan pemba-ngunan water front city Namlea telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 08/S.1/F.d/09/2019 tanggal 15 September,” jelas Sapulette, kepada wartawan.

Mantan Kasi Penyidikan Kejati Maluku ini mengatakan, kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, setelah melalui serangkaian penyelidikan berupa permintaan keterangan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

terhadap pihak-pihak terkait, pengumpulan dokumen atau surat, pemeriksaan fisik serta ekspos hasil penyelidikan.

Namun Sapulette enggan menjelaskan kasus ini secara detail dengan alasan kepentingan penyidikan. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/proyek_reklamasi_pantai_namlea_naik_penyidikan